



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telepon : 021 - 5737104, 5731138  
Laman: [www.itjen.kemdiknas.go.id](http://www.itjen.kemdiknas.go.id)

Nomor : 0634/G. G2/Rhs/WS/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Nasional Hasil Audit Bantuan Sosial  
Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara (RBN)  
Tahun Anggaran 2013

22 Januari 2015

Yth. Direktur Jenderal Kebudayaan  
Jl. Jenderal Sudirman Gedung E, Senayan  
Jakarta

Berdasarkan Program Kerja Inspektorat I Itjen Kemdikbud Tahun 2014 pada bulan April 2014 telah dilaksanakan audit Bantuan Sosial Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara (RBN) dari Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Ditjen Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 pada 78 Lembaga/Komunitas Budaya yang tersebar di 20 (dua puluh) Provinsi dengan hormat kami sampaikan hasil audit sebagai berikut:

## A. Informasi Umum

### 1. Sasaran Audit

78 Lembaga Masyarakat/Komunitas Budaya di 20 Provinsi penerima bantuan sosial Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara dari Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Ditjen Kebudayaan Tahun Anggaran 2013.

### 2. Anggaran

Alokasi anggaran bantuan sosial Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara (RBN) dari Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Ditjen Kebudayaan Tahun 2013 senilai Rp34.603.244.469,00 dengan realisasi senilai Rp34.509.015.455,00 (99,27%), dan dana belum terserap senilai Rp94.229.014,00 (0,272%), jumlah bansos yang diaudit senilai Rp29.356.516.966,00 (84,837%).

## B. Temuan Hasil Audit

### 1. Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Hasil audit sebanyak 100 temuan senilai Rp917.543.712,00 terdiri dari:

- Keharusan pengembalian ke kas Negara 5 temuan senilai Rp123.646.298,00
- Kewajiban penyeteroran kepada Negara 60 temuan senilai Rp793.897.414,00
- Kelemahan administrasi 35 temuan.



2. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Proposal tidak mengacu pada Juknis RBN, pengelolaan administrasi keuangan/pencatatan tidak tertib, bukti penerimaan dan penggunaan dana tidak lengkap, lembaga belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

3. Temuan 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis)

- a. Kegiatan yang berdampak pada kemahalan harga sebesar Rp38.650.000,00 yaitu publikasi/penyiaran radio, Dialog dan temu tokoh serta Gelar Seni Tradisi Tayub Bambu, Kenduri Wayang dan Festival Gamelan Anak, Apresiasi Seni Tradisional Parade Dalang Cilik, dan Festival Dolanan Anak, Sewa mobil dalam acara Festival Memedi Sawah dan Festival Seni Tari.
- b. Bukti pertanggungjawaban kurang lengkap sebesar Rp109.000.000,00 berupa Penyewaan Kendang Besar dan satu set Kendang Jaipong, serta Pengeluaran dana biaya renovasi belum didukung bukti pertanggungjawaban secara lengkap.
- c. Kelebihan pembayaran beberapa kegiatan sejumlah Rp33.786.400,00 berupa biaya transportasi dan pengadaan konsumsi.
- d. Penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan/Juknis sebesar Rp33.300.000,00 atas pembayaran honor panitia kegiatan, Tim Produksi pada kegiatan rekaman lagu dan kegiatan pelatihan persiapan pementasan
- e. Pembayaran honorarium melebihi ketentuan sebesar Rp24.570.000,00 atas pembayaran honor narasumber dan moderator serta duplikasi pembayaran transport peserta
- f. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp57.750.000,00 berupa honorarium penari pada rangkaian kegiatan pelatihan persiapan pagelaran kesenian dan Transaksi hasil pekerjaan Rumah Budaya Nusantara (RBN) Yayasan Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPM-Timur) kurang tepat sasaran.
- g. Penggunaan dana di luar ketentuan sebesar Rp52.500.000,00 untuk pembangunan perluasan sanggar belum dilaksanakan, namun dananya digunakan untuk membiayai usaha lainnya.
- h. Pengadaan barang belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp135.500.000,00 terjadi atas kegiatan berupa pengadaan buku-buku dan CD RBN, pengadaan seperangkat wayang kulit belum selesai dan pekerjaan bangunan rumah budaya belum selesai.

C. Hal – Hal Yang Perlu Diperhatikan

Kelemahan pengendalian intern atas penyaluran dana bantuan social ke Lembaga Masyarakat dari Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud, antara lain:



1. Penyaluran Bantuan Sosial belum sepenuhnya berpedoman pada PMK No.81/PMK/2012, sehingga terjadi dana retur yang belum terkirim/terlambat diketahui dan terjadi pengiriman bantuan social ke lembaga masyarakat ditunjuk melewati tahun anggaran.
2. Sebagian lembaga penerima bansos tidak memiliki dokumen Surat Ketetapan (SK) Penetapan Penerima Bantuan RBN dan MoU.
3. Seleksi penerima bantuan social masih lemah (beberapa lembaga diketahui tidak melalui verifikasi), indikatornya pada proposal yang diajukan tidak sesuai juknis dan tidak dilakukan perbaikan.

#### D. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan hasil audit tersebut, kami merekomendasikan Direktur Jenderal Kebudayaan melalui Direktur Sejarah dan Nilai Budaya agar:

1. Memerintahkan kepala lembaga penerima Bansos Rumah Budaya Nusantara untuk menyelesaikan temuan terkait dengan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan sebanyak 100 temuan dengan nilai Rp917.543.712,00, Temuan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 4 temuan, dan Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) sebanyak 8 temuan dengan nilai Rp485.056.400,00.
2. Memerintahkan kepada para ketua lembaga penerima Bansos Komunitas Budaya untuk menyelesaikan temuan terkait temuan kewajiban penyetoran ke kas Negara senilai Rp793.897.414,00.
3. Memerintahkan kepada para ketua lembaga penerima Bansos Rumah Budaya Nusantara untuk menyelesaikan temuan terkait administrasi pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan yang dikelolanya.
4. Mengevaluasi dan mengecek tempat-tempat lain yang belum menjadi sampel audit dan menyampaikan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal Kemdikbud.
5. Mengenaikan Sanksi kepada petugas/pejabat yang menyebabkan terjadinya temuan.

Demikian Laporan Nasional Hasil Audit Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budaya Nusantara (RBN) dari Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Ditjen Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 pada 78 lembaga Masyarakat/Komunitas Budaya yang tersebar di 20 Provinsi, informasi lengkap termuat di dalam Laporan Kompilasi Hasil Audit (terlampir), untuk menjadi bahan masukan dalam rangka pembinaan di lingkungan unit kerja saudara dan diharapkan permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,



Haryono Umar *a*  
NIP.196009081983021001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekertaris Itjen Kemdikbud u.p Kabag PLP;
3. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya.